



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN



TAHUN
2022

AUDITED



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Informasi yang disajikan telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai wujud akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan memberi informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2023
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GRAFIK.....	VI
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	2
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	3
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	4
LAPORAN KEUANGAN UTAMA	7
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	8
NERACA	9
LAPORAN OPERASIONAL	10
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
PENJELASAN UMUM	12
A.1 DASAR HUKUM.....	12
A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	14
A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	14
A.4 BASIS AKUNTANSI	15
A.5 DASAR PENGUKURAN	15
A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
A.7 KEBIJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PC - PEN)	20
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	21
B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	22
B.2 BELANJA	25
B.2.1 BELANJA PEGAWAI	28
B.2.2 BELANJA BARANG	31
B.2.3 BELANJA MODAL	34
B.2.4 PENGEMBALIAN BELANJA NEGARA	36
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	37
C.1 ASET	37
C.1.1 ASET LANCAR.....	38
C.1.2 ASET TETAP	41
C.1.3 ASET LAINNYA	44
C.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	49
C.2.1 Utang Kepada Pihak Ketiga.....	49
C.3 EKUITAS.....	50
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	50
D.1 PENDAPATAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK	50
D.2 BEBAN PEGAWAI	50
D.3 BEBAN PERSEDIAAN	51
D.4 BEBAN BARANG DAN JASA	51

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN	52
D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS	53
D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	53
D.8 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	54
D.9 KEGIATAN NON OPERASIONAL	54
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	55
E.1 EKUITAS AWAL	55
E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO	55
E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	55
E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	56
E.5 EKUITAS AKHIR	57
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	58
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA	58
F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	58
LAPORAN KEUANGAN PENDUKUNG	59
CETAKAN LAPORAN KEUANGAN	60
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI	65
SURAT HASIL REKONSILIASI DENGAN KPPN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021	4
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	5
Tabel 3 Penentuan Kualitas Piutang	19
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat Aset Tetap	20
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2022	21
Tabel 6 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	23
Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021	23
Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	26
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021	27
Tabel 10 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja TA 2019 - 2022	27
Tabel 11 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	28
Tabel 12 Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	29
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021	29
Tabel 14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 - 2022	30
Tabel 15 Realisasi Belanja Barang Menurut Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	31
Tabel 16 Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	31
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021	32
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019-2022	32
..... Tabel 19 Realisasi Belanja Barang dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	33
Tabel 20 Realisasi Belanja Modal Menurut Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	34
Tabel 21 Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	34
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021	35
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 – 2022	35
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021	36
Tabel 25 Perbandingan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021	37
Tabel 26 Perbandingan Nilai Aset per 31 Desember 2022 dan 2021	37
Tabel 27 Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021	37
Tabel 28 Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	38
Tabel 29 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021	39
Tabel 30 Tabel Mutasi Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022	40
Tabel 31 Rincian Persediaan Usang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022	40
Tabel 32 Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset per 31 Desember 2022 dan 2021	41
Tabel 33 Daftar Perbandingan Aset Tetap di Modul GLP dan Modul Aset per 31 Desember 2022	41
Tabel 34 Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021	42
Tabel 35 Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin	42
Tabel 36 Rincian Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	42
Tabel 37 Rincian Daftar Jalan, Irigasi, dan Jaringan di DJPK per 31 Desember 2022	43

Tabel 38 Rincian Daftar Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022	44
Tabel 39 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	44
Tabel 40 Perbandingan Posisi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	44
Tabel 41 Perbandingan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 dan 2021	45
Tabel 42 Rincian Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022	45
Tabel 43 Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021	48
Tabel 44 Mutasi / Perubahan Aset Lain-lain	48
Tabel 45 Rincian Daftar Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	49
Tabel 46 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	49
Tabel 47 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2022 dan 2021	49
Tabel 48 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021	50
Tabel 49 Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021	50
Tabel 50 Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021	51
Tabel 51 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021	51
Tabel 52 Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021	52
Tabel 53 Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021	53
Tabel 54 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021	53
Tabel 55 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021	54
Tabel 56 Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021	54
Tabel 57 Perbandingan Nilai Ekuitas Awal	55
Tabel 58 Perbandingan Surplus/Defisit LO	55
Tabel 59 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	56
Tabel 60 Perbandingan Nilai Ekuitas Akhir	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 - 2022	27
Grafik 2 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	28
Grafik 3 Komposisi Belanja Pegawai TA 2022	30
Grafik 4 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 - 2022	30
Grafik 5 Komposisi Belanja Barang.....	32
Grafik 6 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019-2022	33
Grafik 7 Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2022	35
Grafik 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 - 2022	36



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BA 015.06 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tingkat UAPPA-E1 Tahun Anggaran 2022 *Audited* yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp187.642.654,00**. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp53.620.999.048,00** atau mencapai **97,71** persen dari anggaran sebesar **Rp54.878.476.000,00**. Jumlah realisasi Belanja tersebut berasal dari realisasi Belanja Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2022		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	-	187.642.654	-	158.592.512
Jumlah Pendapatan	-	187.642.654	-	158.592.512
Belanja Pegawai	13.931.013.000	13.671.787.310	37.495.827.000	36.981.249.712
Belanja Barang	37.583.647.000	36.648.320.288	30.554.813.000	28.731.774.765
Belanja Modal	3.363.816.000	3.300.891.450	4.508.385.000	4.425.292.606
Jumlah Belanja	54.878.476.000	53.620.999.048	72.559.025.000	70.138.317.083

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar **Rp16.052.801.408,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp1.147.136.743,00** Aset Tetap sebesar **Rp12.380.832.127,00**, Aset Lainnya sebesar **Rp2.524.832.538,00**.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar **Rp5.830.832,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas disajikan sebesar **Rp16.046.970.576,00**.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
Aset	16.052.801.408	21.894.825.061	(5.842.023.653)
Aset Lancar	1.147.136.743	1.512.278.460	(365.141.717)
Aset Tetap	12.380.832.127	17.095.888.081	(4.715.055.954)
Aset Lainnya	2.524.832.538	3.286.658.520	(761.825.982)
Kewajiban	5.830.832	230.358.918	(224.528.086)
Kewajiban Jangka Pendek	5.830.832	230.358.918	(224.528.086)
Ekuitas	16.046.970.576	21.664.466.143	(5.617.495.567)
Ekuitas	16.046.970.576	21.664.466.143	(5.617.495.567)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	16.052.801.408	21.894.825.061	(5.842.023.653)

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Operasional-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp16.045.920,00**, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar **Rp62.782.506.681,00** sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar **Rp62.766.460.761,00**. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa defisit sebesar **Rp188.897.951,00** sehingga entitas mengalami defisit sebesar **Rp62.955.358.712,00**.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp21.664.466.143,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp62.955.358.712,00, dan Transaksi antar entitas sebesar Rp57.337.863.145,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.046.970.576,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Pendapatan Negara dan Belanja Negara disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Laporan Operasional dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2022, nilai Pendapatan, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

TA 2022 AUDITED

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1		187.642.654	-	158.592.512
JUMLAH PENDAPATAN			187.642.654	-	158.592.512
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	13.931.013.000	13.671.787.310	98,14	36.981.249.712
Belanja Barang	B.2.2	37.583.647.000	36.648.320.288	97,51	28.731.774.765
Belanja Modal	B.2.3	3.363.816.000	3.300.891.450	98,13	4.425.292.606
JUMLAH BELANJA		54.878.476.000	53.620.999.048	97,71	70.138.317.083

Jakarta, Mei 2023
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.3	53.414.748	56.843.848
Penyisihan Piutang tak Tertagih	C.1.1.4	(5.074.731)	(50.764.456)
Bukan Pajak			
Piutang Bukan Pajak (Netto)		2.667.438	6.079.392
Persediaan	C.1.1.5	1.144.469.305	1.506.199.068
Jumlah Aset Lancar		1.147.136.743	1.512.278.460
ASET TETAP	C.1.2		
Peralatan dan Mesin	C.1.2.1	103.764.804.143	102.080.275.399
Gedung dan Bangunan	C.1.2.2	1.427.595.200	1.427.595.200
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.1.2.3	0	990.851.337
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.4	651.888.518	634.619.773
Akumulasi Penyusutan	C.1.2.5	(93.463.455.734)	(88.037.453.628)
Jumlah Aset Tetap		12.380.832.127	17.095.888.081
ASET LAINNYA	C.1.3		
Aset Tak Berwujud	C.1.3.1	9.891.147.694	8.725.900.966
Aset Lain-Lain	C.1.3.2	448.631.261	423.389.326
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	C.1.3.3	(7.814.946.417)	(5.862.631.772)
Jumlah Aset Lainnya		2.524.832.538	3.286.658.520
JUMLAH ASET		16.052.801.408	21.894.825.061
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.1	5.830.832	230.358.918
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.830.832	230.358.918
JUMLAH KEWAJIBAN		5.830.832	230.358.918
EKUITAS			
Ekuitas	C.3	16.046.970.576	21.664.466.143
JUMLAH EKUITAS		16.046.970.576	21.664.466.143
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		16.052.801.408	21.894.825.061

Jakarta, Mei 2023
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	16.045.920	38.000.000
Pendapatan Hibah			
Jumlah Pendapatan Operasional		16.045.920	38.000.000
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	13.445.841.459	37.099.532.857
Beban Persediaan	D.3	690.101.447	688.709.277
Beban Barang dan Jasa	D.4	19.052.980.883	82.680.207.337
Beban Pemeliharaan	D.5	5.761.926.005	4.909.167.587
Beban Perjalanan Dinas	D.6	14.340.970.181	7.059.390.137
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	9.490.703.852	10.211.756.568
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(17.146)	20.242
Beban Lain-Lain		0	0
Jumlah Beban Operasional		62.782.506.681	142.648.784.005
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(62.766.460.761)	(142.610.784.005)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		149.446.792	91.037.870
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	1.376.062
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		149.446.792	89.661.808
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		16.040.000	27.493.000
Beban kegiatan Non Operasional Lainnya		354.384.743	20.689.344
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		(338.344.743)	6.803.656
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(188.897.951)	96.465.464
POS LUAR BIASA		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(62.955.358.712)	(142.514.318.541)

Jakarta, Mei 2023
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	PERIODE	
		31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E.1	21.664.466.143	28.580.252.891
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(62.955.358.712)	(142.514.318.541)
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	(107.068.869)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0	0
Selisih Revaluasi aset Tetap	E.3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	0	(105.522.224)
Koreksi lain-Lain	E.3.5	0	(1.546.645)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	57.337.863.145	135.705.600.662
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	53.620.999.048	70.138.317.083
Diterima dari Entitas Lain	E.4.1	(187.642.654)	(158.592.512)
Transfer Keluar	E.4.2	(1.744.948.515)	(971.966.160)
Transfer Masuk	E.4.2	2.457.878.981	11.030.250
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.3	3.191.576.285	66.686.812.001
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(5.617.495.567)	(6.915.786.748)
EKUITAS AKHIR	E.5	16.046.970.576	21.664.466.143

Jakarta, Mei 2023
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.01.2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
26. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
27. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-1/PK/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Atas Beban (BA-015) dan Gerakan Efisiensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi:

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJPK menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu SAKTI menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerapkan basis Akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

A.5 DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan DJPK dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh DJPK yang merupakan entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

1) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN-LRA

Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan- LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN-LO

Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada DJPK adalah sebagai berikut:

- 2.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- 2.2 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.
- 2.3 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS BELANJA

Kebijakan Akuntansi atas Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS BEBAN

Kebijakan Akuntansi atas Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS ASET

Kebijakan Akuntansi atas Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya:

a) ASET LANCAR

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan.

Kas disajikan dalam Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan dalam Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b) ASET TETAP

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai Aset Tetap disajikan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c) PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d) ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* computer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

6) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS KEWAJIBAN

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Kewajiban*

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS EKUITAS

Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penentuan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penentuan Kualitas Piutang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Penentuan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;	0.5%
Kurang lancar	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;	10%
Diragukan	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau 2. Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.	100%
-------	--	------

9) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENYUSUTAN ASET TETAP

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel Masa Manfaat Aset Tetap disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap lainnya (alat musik modern)	4 tahun

A.7 KEBIJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PC - PEN)

Kebijakan atas Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Program PEN yang selanjutnya disebut PC-PEN merupakan aksi/tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menangani permasalahan yang diakibatkan adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Untuk memudahkan perencanaan Kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antarunit organisasi,

antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020, pengalokasian dana penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus Covid-19. Pada tahun anggaran 2022, DJPK menggunakan akun 521131 (Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19) dan 522192 (Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19) terkait belanja yang diperuntukkan untuk keperluan organisasi dalam menghadapi ancaman Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan DJPK menggunakan sistem aplikasi pelaporan SAKTI serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan DJPK melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian peristiwa luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, DJPK telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2022

Uraian	2022			
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Pendapatan dan Hibah				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	187.642.654	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	0	0	187.642.654	-
Belanja Negara				
Rupiah Murni	73.594.136.000	50.615.658.000	49.668.674.797	98,13
Belanja Pegawai	37.359.491.000	13.931.013.000	13.671.787.310	98,14
Belanja Barang	31.944.039.000	33.370.829.000	32.745.196.037	98,13
Belanja Modal	4.290.606.000	3.313.816.000	3.251.691.450	98,13
Hibah Luar Negeri	100.000.000	4.262.818.000	3.952.324.251	92,72
Belanja Barang	100.000.000	4.212.818.000	3.903.124.251	92,65
Belanja Modal		50.000.000	49.200.000	98,40
Jumlah Belanja Negara	73.694.136.000	54.878.476.000	53.620.999.048	97,71

Pada DIPA awal DJPK terdapat sumber pendanaan dari Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp73.594.136.000,00**, dan sumber pendanaan dari hibah dengan mekanisme *Recipient Executed Trust Fund* (RETF) yaitu eksekusi kegiatan dilaksanakan oleh DJPK dengan standar biaya pemerintah pusat (SBU/SBM), dan kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan DJPK. Berdasarkan *Grant Agreement* No. TF0B5420; *Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund* (PFM-MDTF) *Phase III World Bank* sebesar US\$547.240,00.

Kegiatan Skema *Recipient Executed Trust Fund* (RETF) Tahun 2022 antara lain:

- a. *Support for Early Implementation of the HKPD Law;*
- b. *Fiscal Decentralization Forum;*
- c. *Evaluation of DAK Non Fisik Effectivity as input in Performance Based Allocation (Specifically to Support the Stunting Reduction Program);*
- d. *Performance-Based Allocations for DAK Non Fisik in Education, Health, and Economic Recovery;*
- e. *Regional Technical Guidance for Implementing Tax Administration Modernization;*
- f. *Implementation Support for the Optimalization of Local Government Cash Management;*
- g. *Performance-Based Allocations for DAK Non Fisik in Education, Health, and Economic Recovery;*
- h. *Technical Support on Implementation of SIKD Enhancement.*

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2022, pagu yang bersumber dari rupiah murni mengalami revisi menjadi sebesar **Rp50.615.658.000,00** dan yang bersumber dari hibah menjadi sebesar **Rp4.262.818.000,00**. Sehingga total pagu anggaran menjadi **Rp54.878.476.000,00**.

B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi PNB
Rp98.495.736,00

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp187.642.654,00**. DJPK tidak menetapkan target dalam APBN TA 2022. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar **Rp158.592.512,00**, realisasi PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp29.050.142,00** atau **18,32** persen. Penerimaan semua berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PNBP pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar **Rp16.045.920,00**, Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar **Rp149.446.792,00**, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar **Rp15.750.000,00**, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar **Rp290.000,00** serta Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar **Rp6.109.942,00**. Besarnya realisasi PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per akun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	16.045.920	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	149.446.792	0
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	15.750.000	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	290.000	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6.109.942	0

Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Akun	Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	16.045.920	38.000.000	(21.954.080)	(57,77)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	149.446.792	91.037.870	58.408.922	64,16
425791	Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Bendahara	15.750.000	27.493.000	(11.743.000)	(42,71)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	290.000		290.000	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	6.109.942	2.061.642	4.048.300	196,36
Total		187.642.654	158.592.512	29.050.142	18,32

B.1.1 PENDAPATAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI NON LITBANG LAINNYA

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya
Rp16.045.920,00

Pendapatan dari Penjualan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya adalah PNBPN Lainnya yang berasal dari penjualan pemusnahan arsip. Sampai dengan 31 Desember 2021, DJPK menerima pendapatan dari penjualan pemusnahan arsip senilai Rp16.045.920,00. Pendapatan berasal dari penghapusan arsip DJPK sesuai KMK Nomor 38/KM.1/SJ.8/2022.

B.1.2 PENDAPATAN DARI PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN

Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
Rp149.446.792,00

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin adalah PNBPN Lainnya yang berasal dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp149.446.792,00 berasal dari:

- Penjualan 1 (satu) paket BMN berupa Perangkat TIK, Peralatan Kantor dan Meubelair sesuai Risalah Lelang nomor 33/26/2022 tanggal 19 Januari 2022 dan sesuai

pelunasan pembayaran NTPN nomor 05C650N9VHGD9SQI tanggal 19 Januari 2022 sebesar **Rp61.234.560,00**.

- b. Penjualan 1 (satu) paket BMN berupa Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang nomor 32/26/2022 tanggal 19 Januari 2022 dan sesuai pelunasan pembayaran NTPN nomor 7C3097QLU63HKEUO tanggal 20 Januari 2022 sebesar **Rp15.111.234,00**.
- c. Penjualan 1 (satu) paket BMN berupa kendaraan dinas sesuai Risalah Lelang nomor 984/26/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan sesuai pelunasan pembayaran NTPN nomor 1CEF361QUHVI4NPM tanggal 20 Desember 2022 sebesar **Rp35.300.999,00**.
- d. Penjualan 1 (satu) paket BMN berupa Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang nomor 983/26/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan sesuai pelunasan pembayaran NTPN nomor 92AA30N9VIH7JQJ0 tanggal 20 Desember 2022 sebesar **Rp37.799.999,00**.

B.1.3 PENDAPATAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BUKAN BENDAHARA

*Pendapatan
Penyelesaian
Kerugian Negara
Bukan Bendahara
Rp15.750.000,00*

Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Bendahara adalah PNBPN yang berasal dari pembayaran penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.

Pada Satker DJPK terdapat Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara berasal dari Pelanggaran Masa Wajib Kerja Tugas Belajar

- a. Sdr. Septian Praditya Nugraha sebesar **Rp7.500.000,00**. Berdasarkan Surat Penagihan SPn-1/PK/PK.1/2022 tanggal 25 April 2022, kerugian negara tersebut telah dibayarkan lunas sesuai NTPN nomor 9D70A6U8EBQ87EM3 tanggal 26 April 2022;
- b. Sdri. Hepy Siskayani sebesar **Rp8.250.000,00**. Berdasarkan Surat Penagihan SPn-2/PK/PK.1/2022 tanggal 25 April 2022, kerugian negara tersebut telah dibayarkan lunas sesuai NTPN nomor 8C5020N9VHPHCH24 tanggal 25 April 2022;

B.1.4 PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU

*Penerimaan
Kembali Belanja
Pegawai TAYL
Rp290.000,00*

Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL yang berasal dari setoran pengembalian kelebihan pembayaran uang makan pegawai.

Sampai dengan 31 Desember 2022, DJPK menerima Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar **Rp290.000,00** berasal dari berbagai penerimaan sebagai berikut:

- a. **Rp37.000,00** berasal dari pengembalian uang makan Desember 2021 a.n. Abri Setiawan sesuai NTPN nomor 289220N9VHGID470 tanggal 24 Januari 2022;
- b. **Rp105.000,00** berasal dari pengembalian uang makan Desember 2021 a.n. Kukoh Indra KA. sesuai NTPN nomor D37183CIF17NK4IV tanggal 25 Januari 2022;
- c. **Rp74.000,00** berasal dari pengembalian uang makan Desember 2021 a.n. Arifudin Miftahul Huda sesuai NTPN nomor 191CE0N9VHGID4C0 tanggal 25 Januari 2022;
- d. **Rp74.000,00** berasal dari pengembalian uang makan Desember 2021 a.n. Britany Alasen Sembiring sesuai NTPN nomor 940C76U8EBH984FB tanggal 26 Januari 2022;

B.1.5 PENERIMAAN KEMBALI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN YANG LALU

*Penerimaan
Kembali Belanja
Barang TAYL
Rp6.109.942,00*

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL adalah PNBPN Lainnya yang diakibatkan oleh pembayaran kembali atas kelebihan bayar belanja barang yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran yang lalu.

Sampai dengan 31 Desember 2022, DJPK menerima Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar **Rp6.109.942,00** berasal dari pengembalian biaya sewa mesin fotokopi digital TA 2021 sesuai BAST-0187/PPK/DJPK/2021 yang telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN nomor 286237QLU633PVIO tanggal 7 Januari 2022.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja Pagu anggaran TA 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp17.680.549.000,00** atau **24,37** persen dari pagu anggaran TA 2021 sebesar **Rp72.559.025.000,00**. Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJPK Nomor ND-165/PK.1/2022 tanggal 21 Januari 2022, pagu DJPK mengalami *refocussing* dan realokasi anggaran dalam rangka kebutuhan tambahan anggaran untuk sosialisasi UU HKPD dan Penyusunan RPP turunan UU HKPD. Sumber *refocussing* diutamakan berasal dari kegiatan bimbingan teknis dan perjalanan dinas yang dipertimbangkan dapat dilaksanakan secara *hybrid* dengan tetap mempertahankan capaian output. Selanjutnya, kegiatan yang terkena *refocussing* dan realokasi dapat diusulkan mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga donor.

Selain terdapat *refocussing* dan realokasi, DJPK juga mengajukan usulan revisi anggaran berupa penambahan blokir *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Keuangan TA 2022 sebesar **Rp4.230.117.000,00** sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 23 Mei 2022 tentang Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-5/MK.1/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Pemenuhan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Keuangan TA 2022. Kebijakan tersebut dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam agenda Belanja Subsidi dalam APBN tahun 2022 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2022 dalam rangka Kebijakan Antisipatif APBN untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat, dan Kesehatan APBN tanggal 19 Mei 2022 sebagai respon atas meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik perlu diantisipasi antara lain dengan melakukan penambahan *Automatic Adjustment* (pencadangan anggaran) pada semua Kementerian/Lembaga. Penambahan *Automatic Adjustment* belanja dimaksud dilakukan terhadap kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Sumber Dana Rupiah Murni (RM);
- b. Di luar Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional;
- c. Di luar Belanja Anggaran Pendidikan;
- d. Dapat mencakup Belanja Barang Non Operasional yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022; dan
- e. Dapat mencakup Belanja Modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022.

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-172/PK/2022, tanggal 21 September 2022, hal Usulan Revisi Anggaran Dalam Rangka Pembukaan Blokir Tahap II DJPK TA 2022 dan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-581/AG/AG.3/2022, tanggal 30 September 2022, hal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2022 unit DJPK-Revisi ke-5 Usulan revisi anggaran berupa revisi pembukaan blokir dalam

rangka relaksasi kebijakan *Automatic Adjustment* tahap kedua untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas di lingkup DJPK, yang berdampak kepada revisi pergeseran antar Program/Kegiatan/KRO/RO pada RKAKL/DIPA Unit DJPK telah disahkan. Revisi anggaran tersebut terdapat pergeseran anggaran pagu program dari Program Pengelolaan Belanja Negara sebesar Rp1.709.269.000,00 dan Program Kebijakan Fiskal sebesar Rp956.366.000,00 ke Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.665.635.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Dana/Program	Semula	Blokir Semula	Menjadi	Blokir Menjadi	Perubahan
Rupiah Murni	54.878.476.000		54.878.476.000		0
Program Kebijakan Fiskal	4.687.395.000	956.366.000	3.731.029.000	0	(956.366.000)
Program Pengelolaan Belanja Negara	11.647.587.000	2.348.222.000	9.938.318.000	0	(1.709.269.000)
Program Dukungan Manajemen	38.543.494.000	925.529.000	41.209.129.000	497.245.000	2.665.635.000

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-450/MK.2/2022 hal Penghapusan Sisa Blokir *Automatic Adjustment* (AA) TA 2022 dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan, DJPK mengajukan usulan revisi anggaran dalam rangka penghapusan sisa blokir AA sesuai surat Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-186/PK/2022 tanggal 31 Oktober 2022. Atas hal tersebut telah disahkan melalui surat Dirjen Anggaran nomor S-767/AG/AG.3/2022 tanggal 2 November 2022 hal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2022 Unit Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berupa:

- Pembukaan blokir (relaksasi) anggaran dalam rangka kebijakan *Automatic Adjustment* tahap kedua pada unit DJPK sebesar Rp497.245.000,00;
- Revisi pergeseran antar Kegiatan/KRO/RO dalam Program yang sama;
- Revisi perubahan volume RO.

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp53.620.999.048,00** atau **97,71** persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar **Rp54.878.476.000,00** setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar **Rp183.985.389,00**.

Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran	Belanja	Pengembalian	Belanja Netto	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/2
Rupiah Murni	50.615.658.000	49.833.872.586	165.197.789	49.668.674.797	98,13
Belanja Pegawai	13.931.013.000	13.690.183.601	18.396.291	13.671.787.310	98,14
Belanja Barang	33.370.829.000	32.891.997.535	146.801.498	32.745.196.037	98,13
Belanja Modal	3.313.816.000	3.251.691.450	-	3.251.691.450	98,13
Hibah Luar Negeri	4.262.818.000	3.971.111.851	18.787.600	3.952.324.251	92,72
Belanja Barang	4.212.818.000	3.921.911.851	18.787.600	3.903.124.251	92,65
Belanja Modal	50.000.000	49.200.000	-	49.200.000	98,40
Total	54.878.476.000	53.804.984.437	183.985.389	53.620.999.048	97,71

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp16.517.318.035,00** atau **23,55** persen dari realisasi belanja per 31 Desember 2021 sebesar **Rp70.138.317.083,00**. Namun, secara persentase realisasi belanja terhadap pagu belanja-mengalami kenaikan dari **96,66** persen di TA 2021 menjadi **97,71** persen di TA 2022.

Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menurut jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perbandingan antara realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

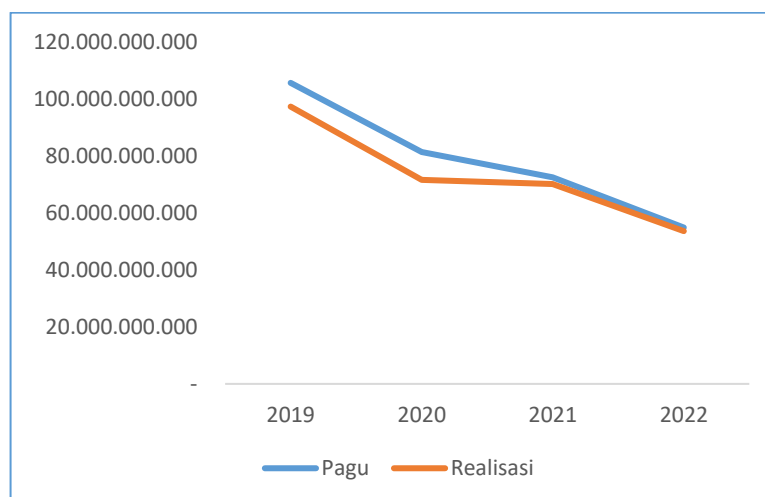
Uraian	2022		%	2021		%
	Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi	
Belanja Pegawai	13.931.013.000	13.671.787.310	98,14	37.495.827.000	36.981.249.712	98,63
Belanja Barang	37.583.647.000	36.648.320.288	97,51	30.554.813.000	28.731.774.765	94,03
Belanja Modal	3.363.816.000	3.300.891.450	98,13	4.508.385.000	4.425.292.606	98,16
Total	54.878.476.000	53.620.999.048	97,71	72.559.025.000	70.138.317.083	96,66

Perkembangan pagu, realisasi, dan persentase realisasi belanja TA 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 10 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja TA 2019 - 2022

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2019	105.654.656.000	97.326.327.096	92,12
2020	81.342.606.000	71.613.100.067	88,04
2021	72.559.025.000	70.138.317.083	96,66
2022	54.878.476.000	53.620.999.048	97,71

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 - 2022



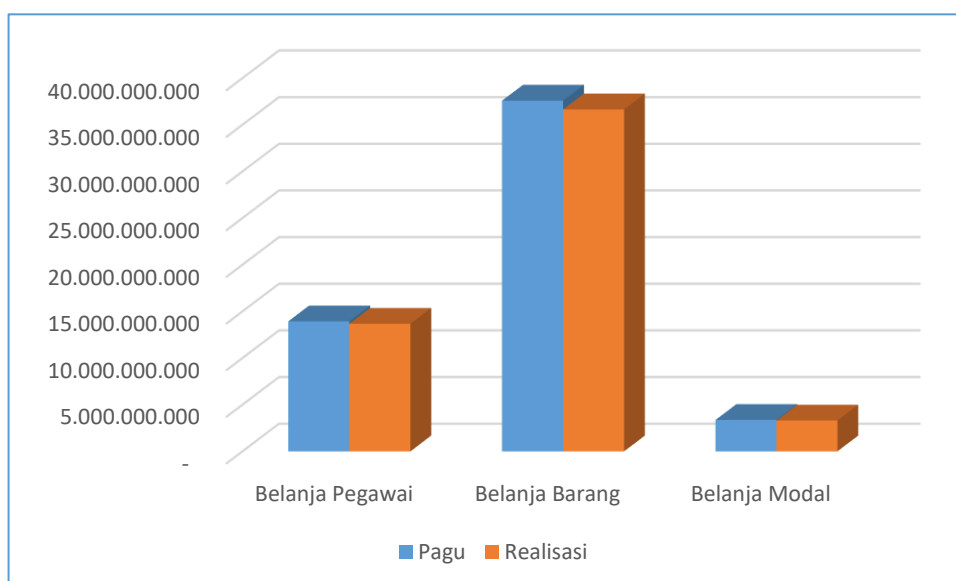
Realisasi Belanja menurut jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	13.931.013.000	13.671.787.310	98,14%
Belanja Barang	37.583.647.000	36.648.320.288	97,51%
Belanja Modal	3.363.816.000	3.300.891.450	98,13%
Total	54.878.476.000	53.620.999.048	97,71%

Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2022 sebagaimana tampak pada tabel dan grafik berikut.

Grafik 2 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022



B.2.1 BELANJA PEGAWAI

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp13.671.787.310,00*

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Alokasi awal pada belanja pegawai sebesar **Rp37.359.491.000,00** direvisi menjadi **Rp13.931.013.000,00** dalam rangka implementasi pemusatan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan seiring ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/KMK.01/2022 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/KMK.01/2022. Adapun komponen gaji yang dipusatkan ke Sekretariat Jenderal meliputi Gaji Induk, Gaji Ketiga Belas, Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, Tunjangan Hari Raya, Gaji Terusan, dan Uang Muka/Persekot Gaji. Pelaksanaan pemusatan gaji DJPK dimulai Bulan Mei TA 2022. DJPK telah menghitung proyeksi kebutuhan belanja pegawai hingga akhir tahun 2022 dan

menyelesaikan potensi pagu minus sebelum pengajuan revisi anggaran ke Sekretariat Jenderal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS serta Belanja Lembur. Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.671.787.310,00 atau 98,14 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2022. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp23.309.462.402,00 atau 63,03 persen. Dalam penurunan tersebut Belanja Lembur mengalami penurunan sebesar 42,35 persen pasca berlakunya mekanisme pengelolaan lembur berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penggunaan Modul Pengelolaan Lembur pada e-Kemenkeu dan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-1/PK/2022 tanggal 16 Maret 2022. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2022 sebanyak 538 orang. Rincian Belanja Pegawai TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12 Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	13.707.203.000	13.496.472.310	98,46
Belanja Lembur	223.810.000	175.315.000	78,33
Total	13.931.013.000	13.671.787.310	98,14

Perbandingan antara realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	7.285.701.860	25.299.573.720	(18.013.871.860)	(71,20)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	104.709	399.162	(294.453)	(73,77)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	499.128.250	1.748.462.040	(1.249.333.790)	(71,45)
Belanja Tunj. Anak PNS	154.596.766	532.029.282	(377.432.516)	(70,94)
Belanja Tunj. Struktural PNS	421.980.000	1.438.320.000	(1.016.340.000)	(70,66)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	282.760.000	1.017.400.000	(734.640.000)	(72,21)
Belanja Tunj. PPh PNS	10.673.646	84.829.769	(74.156.123)	(87,42)
Belanja Tunj. Beras PNS	407.217.660	1.424.066.880	(1.016.849.220)	(71,40)
Belanja Uang Makan PNS	4.209.488.000	4.308.618.900	(99.130.900)	(2,30)
Belanja Tunjangan Umum PNS	238.610.000	837.660.000	(599.050.000)	(71,51)
Belanja Uang Lembur	179.922.710	312.086.000	(132.163.290)	(42,35)
Jumlah Belanja Bruto	13.690.183.601	37.003.445.753	(23.313.262.152)	(63,00)
Pengembalian Belanja	18.396.291	22.196.041	(3.799.750)	(17,12)
Jumlah Belanja Netto	13.671.787.310	36.981.249.712	(23.309.462.402)	(63,03)

Komposisi Belanja Pegawai TA 2022 dapat digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 3 Komposisi Belanja Pegawai TA 2022

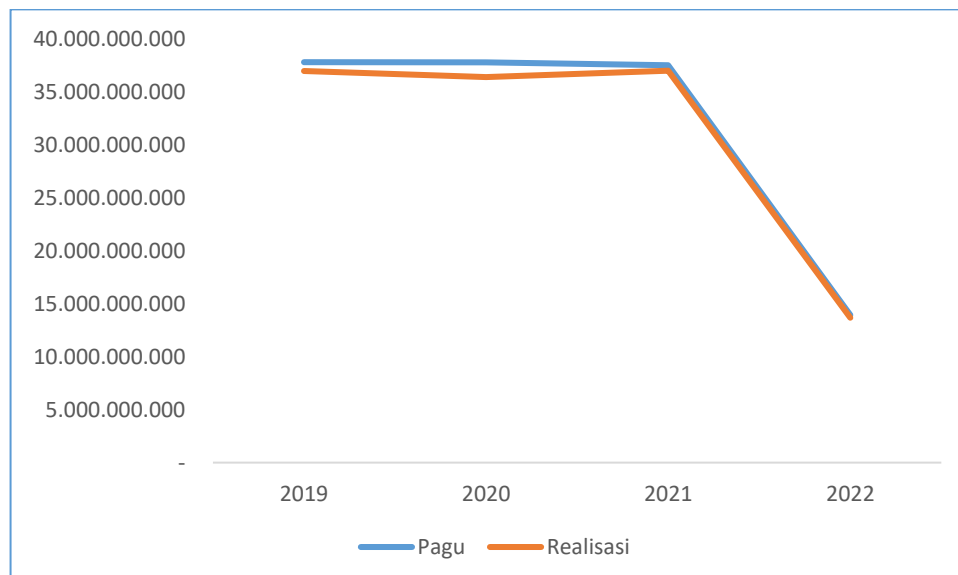


Perbandingan persentase realisasi belanja pegawai TA 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 - 2022

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2019	37.785.676.000	36.964.703.750	97,83
2020	37.782.154.000	36.392.819.023	96,32
2021	37.495.827.000	36.981.249.712	98,63
2022	13.931.013.000	13.671.787.310	98,14

Grafik 4 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 - 2022



B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja
Barang

Rp36.648.320.288,00

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.648.320.288,00 yang berarti 97,51 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2022 sebesar Rp37.583.647.000,00. Realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp32.745.196.037,00 dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp3.903.124.251,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2021, realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.916.545.523,00 atau 27,55 persen.

Tabel 15 Realisasi Belanja Barang Menurut Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni			
Belanja Barang	33.370.829.000	32.745.196.037	98,13
Hibah Luar Negeri			
Belanja Barang	4.212.818.000	3.903.124.251	92,65
Total	37.583.647.000	36.648.320.288	97,51

Persentase realisasi belanja barang terhadap pagu belanja barang mengalami kenaikan dari 48,03 persen di tahun 2021 menjadi 55,14 persen di tahun 2022.

Rincian Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 16 Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	7.470.207.000	7.435.734.140	99,54
Belanja Barang Non Operasional	3.123.186.000	3.004.105.154	96,19
Belanja Barang Persediaan	789.000.000	788.949.274	99,99
Belanja Jasa	5.619.684.000	5.422.828.381	96,50
Belanja Pemeliharaan	5.656.476.000	5.655.733.158	99,99
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	14.925.094.000	14.340.970.181	96,09
Total	37.583.647.000	36.648.320.288	97,51

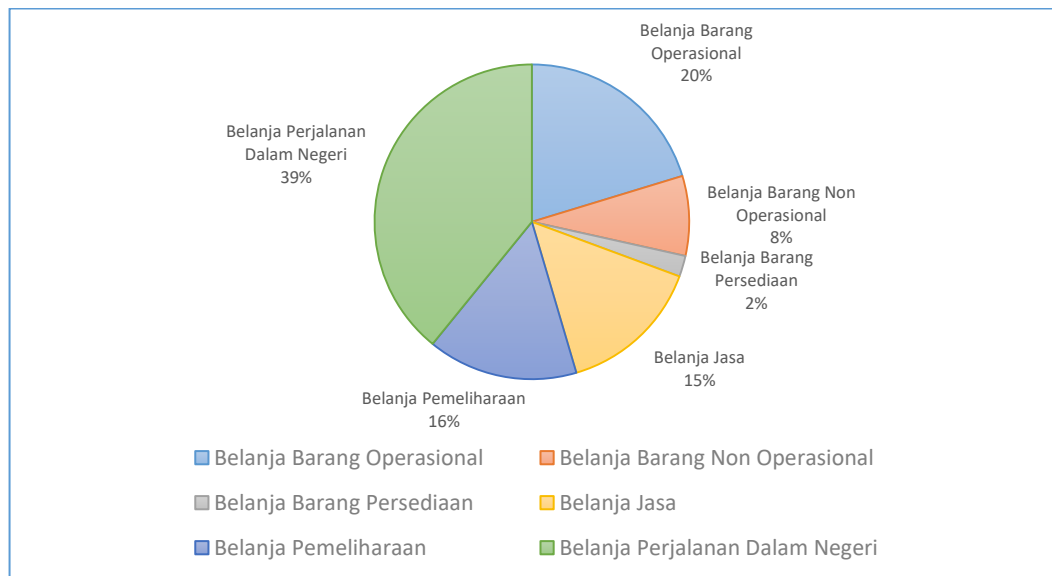
Perbandingan antara realisasi Belanja Barang TA 2022 dan TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	7.435.734.140	9.095.253.254	(1.659.519.114)	(18,25)
Belanja Barang Non Operasional	3.004.590.154	1.848.364.655	1.156.225.499	62,55
Belanja Barang Persediaan	788.949.274	856.681.500	(67.732.226)	(7,91)
Belanja Jasa	5.422.992.381	5.127.914.356	295.078.025	5,75
Belanja Pemeliharaan	5.655.733.158	4.816.015.272	839.717.886	17,44
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	14.505.910.279	7.280.596.623	7.225.313.656	99,24
Jumlah Belanja Bruto	36.813.909.386	29.024.825.660	7.789.083.726	26,84
Pengembalian Belanja	165.589.098	293.050.895	(127.461.797)	(43,49)
Jumlah Belanja Netto	36.648.320.288	28.731.774.765	7.916.545.523	27,55

Komposisi Belanja Barang TA 2022 dapat digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 5 Komposisi Belanja Barang

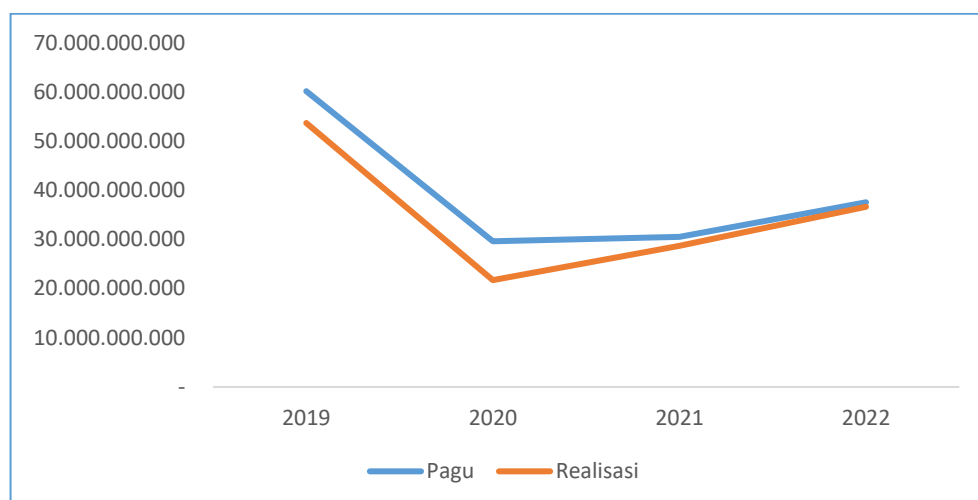


Perbandingan persentase realisasi belanja barang TA 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019-2022

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2019	60.206.309.000	53.728.095.532	89,24
2020	29.656.034.000	21.746.628.962	73,33
2021	30.554.813.000	28.731.774.765	94,03
2022	37.583.647.000	36.648.320.288	97,51

Grafik 6 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019-2022



Tabel 19 Realisasi Belanja Barang dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.192.700.000	1.192.251.227	99,96%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	89.083.000	83.606.149	93,85%
Total		1.281.783.000	1.275.857.376	99,54%

Realisasi Belanja Barang Penanganan Covid-19 Rp1.275.857.376,00 Dari belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersebut terdapat realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 yaitu sebesar **Rp1.275.857.376,00** atau **99,54** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2022 sebesar **Rp1.281.783.000,00**. Rincian penggunaan belanja barang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- a. Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar **Rp1.192.251.227,00** digunakan untuk:
 - 1) Biaya Rapid Test/PCR/Swab Antigen Keperluan Tindak lanjut Kesehatan Pegawai;
 - 2) Pengadaan Masker pelindung hidung dan mulut;
 - 3) Pengadaan *Hand Sanitizer*;
 - 4) Pengadaan Desinfektan;
 - 5) Bantuan Biaya Komunikasi – Penyediaan Paket Data atau Kuota Internet;
 - 6) Penyediaan paket Berlangganan aplikasi *Video Conference*; dan
 - 7) Vitamin dan Penambah Daya Tahan Tubuh.
- b. Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar **Rp83.606.149,00** digunakan untuk biaya Rapid Test/PCR/Swab Antigen dalam rangka kegiatan perjalanan dinas maupun kegiatan yang dilakukan secara fisik lainnya.

B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Rp3.300.891.450,00 Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terkait dengan pembentukan aset, baik itu aset tetap, aset lainnya, ataupun terkait kapitalisasi aset tetap. Terdapat proses pendetilan aset setelah transaksi belanja modal terjadi.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.300.891.450,00 atau 98,13 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2022 sebesar Rp3.363.816.000,00. Realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp3.251.691.450,00 dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp49.200.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2021, realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.124.401.156,00 atau 25,41 persen.

Tabel 20 Realisasi Belanja Modal Menurut Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni			
Belanja Modal	3.313.816.000	3.251.691.450	98,13
Hibah Luar Negeri			
Belanja Modal	50.000.000	49.200.000	98,40
Total	3.363.816.000	3.300.891.450	98,13

Penurunan disebabkan karena pagu belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan perangkat TIK TA 2022 turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan TA 2021. Hal ini dikarenakan penganggaran belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Meskipun demikian, secara persentase realisasi Belanja Modal TA 2022 tetap terjaga di atas 98 persen.

Dalam rangka penyelesaian ketidaksesuaian antara akun belanja dengan kode BMN pada belanja modal pembelian buku perpustakaan, DJPK melakukan koreksi SPM nomor 01261A senilai Rp17.009.714,00 dari semula akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) menjadi 536111 (belanja Modal lainnya), dengan sebelumnya melakukan revisi DIPA untuk penyediaan pagu pada akun 536111 merujuk pada surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan, DJPb nomor S-1/PB/PB.6/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal Penyesuaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Pengusulan revisi DIPA tersebut telah disahkan sesuai surat Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta nomor S-166/WPB.12/2023 tanggal 17 Januari 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker DJPK, Kementerian Keuangan.

Rincian Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 21 Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	1.183.771.000	1.158.389.226	97,86%
Belanja Modal Lainnya	2.180.045.000	2.142.502.224	98,28%
Total	3.363.816.000	3.300.891.450	98,13%

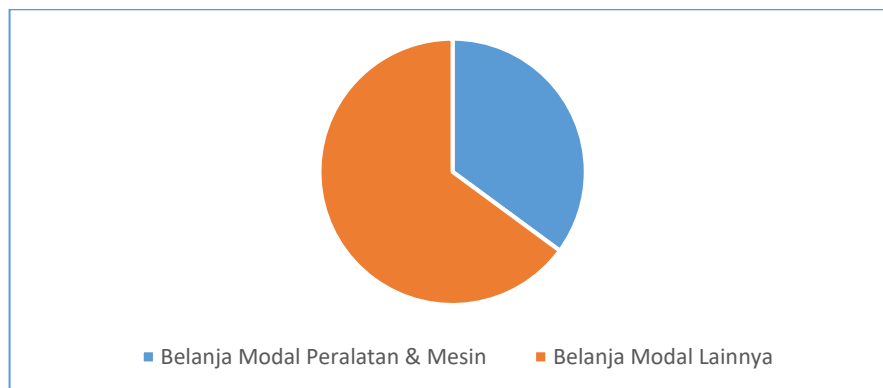
Perbandingan antara realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
B. Modal Peralatan dan Mesin	1.158.389.226	1.982.883.253	(824.494.027)	(41,58)
Belanja Modal Lainnya	2.142.502.224	2.442.409.353	(299.907.129)	(12,28)
Jumlah Belanja Bruto	3.300.891.450	4.425.292.606	(1.124.401.156)	(25,41)
Pengembalian Belanja	0	0	0	
Jumlah Belanja Netto	3.300.891.450	4.425.292.606	(1.124.401.156)	(25,41)

Komposisi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dapat digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 7 Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2022

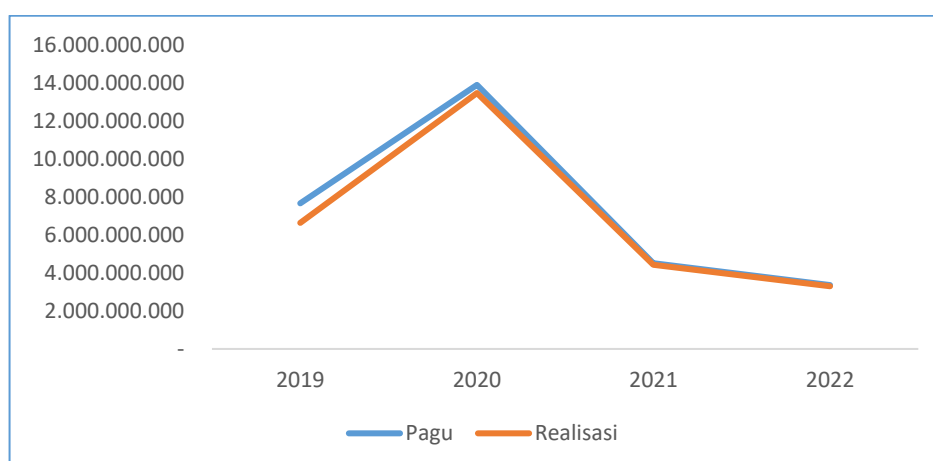


Perbandingan persentase realisasi belanja modal TA 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 – 2022

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2019	7.662.671.000	6.633.527.814	86,57
2020	13.904.418.000	13.473.652.082	96,90
2021	4.508.385.000	4.425.292.606	98,16
2022	3.363.816.000	3.300.891.450	98,13

Grafik 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 - 2022



B.2.4 PENGEMBALIAN BELANJA NEGARA

Realisasi
Pengembalian
Belanja Negara
Rp183.985.389,00

Pengembalian Belanja adalah penerimaan kembali dari kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang menjadi hak negara dan harus disetor ke Kas Umum Negara dan tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun dengan alasan apapun. Pengembalian Belanja berasal dari ketiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Pengembalian Belanja dibukukan sesuai dengan akun belanjanya.

Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 yaitu sebesar Rp183.985.389,00 dan Rp315.246.936,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp131.261.547,00 atau 41,64 persen. Rincian Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Akun	Uraian Pengembalian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	13.788.581	22.196.041	(8.407.460)	(37,88)
5122	Belanja Uang Lembur	4.607.710	0	4.607.710	
Jumlah Pengembalian Belanja Pegawai		18.396.291	22.196.041	(3.799.750)	(17,12)
5211	Belanja Barang Operasional	0	60.578.149	(60.578.149)	(100,00)
5212	Belanja Barang Non Operasional	485.000	2.775.000	(2.290.000)	
5218	Belanja Barang Persediaan	0	0	0	
5221	Belanja Jasa	164.000	8.491.260	(8.327.260)	(98,07)
5231	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	164.940.098	221.206.486	(56.266.388)	(25,44)
Jumlah pengembalian Belanja Barang		165.589.098	293.050.895	(127.461.797)	(43,49)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	
5361	Belanja Modal Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pengembalian Belanja Modal		0	0	0	
Total		183.985.389	315.246.936	(131.261.547)	(41,64)

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Perbandingan
Neraca per 31
Desember 2022
dan 2021

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Perbandingan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 25 Perbandingan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021

Perkiraan	2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset	16.052.801.408	21.894.825.061	(5.842.023.653)	(26,68)
Kewajiban	5.830.832	230.358.918	(224.528.086)	(97,47)
Ekuitas	16.046.970.576	21.664.466.143	(5.617.495.567)	(25,93)

Penjelasan setiap pos-pos dalam Neraca sebagai berikut.

C.1 ASET

Aset
Rp16.052.801.408,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.052.801.408,00 dan Rp21.894.825.061,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.842.023.653,00 atau 26,68 persen. Penurunan nilai aset disebabkan adanya penyusutan terhadap nilai aset di TA 2022, penghapusan aset karena umur ekonomisnya sudah habis dan sudah waktunya untuk dihapuskan, dan reklasifikasi pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui kapitalisasi ke Gedung dan Bangunan serta transfer keluar.

Tabel 26 Perbandingan Nilai Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
16.052.801.408	21.894.825.061	(5.842.023.653)	(26,68)

Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 27 Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

Perkiraan	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	1.147.136.743	1.512.278.460	(365.141.717)	(24,15)
Aset Tetap	12.380.832.127	17.095.888.081	(4.715.055.954)	(27,58)
Aset Lainnya	2.524.832.538	3.286.658.520	(761.825.982)	(23,18)
Jumlah Aset	16.052.801.408	21.894.825.061	(5.842.023.653)	(26,68)

C.1.1 ASET LANCAR

C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang muka kerja dari KPPN yang diberikan kepada Satuan Kerja berupa uang persediaan untuk melaksanakan aktivitasnya sebelum pengeluaran yang dilakukan dipertanggungjawabkan. Kas di Bendahara Pengeluaran dipertanggungjawabkan pada akhir periode akuntansi. Penyetoran sisa UP satker DJPK sesuai NTPN nomor OCB2E8JM919HPFI5 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp3.249,00.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.1.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan, dalam hal ini dapat berupa belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Sedangkan Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.1.1.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak
Rp53.414.748,00

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang timbul dari pungutan pendapatan Negara selain Pajak.

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp53.414.748,00 dan Rp56.843.848,00 merupakan piutang yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak yang belum dilunasi/disetor ke kas negara sampai dengan tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Klasifikasi Piutang	Debitor	Saldo Awal	Perubahan (+/-)	Saldo Akhir 31 Desember 2022	Penggolongan				Nilai Agunan Barang Sitaan
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
PNBP	PT Aek Sibundong Nauli	39.785.106	-	39.785.106	-	-	-	39.785.106	-
	Sdr. Sanjaya Wiratama	10.948.800	-	10.948.800	-	-	-	10.948.800	-
	PT Setiawan Kumalagiri	6.109.942	(6.109.942)	-	-	-	-	-	-
Jumlah Piutang		56.843.848		53.414.748	2.680.842	-	-	50.733.906	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih								50.747.310	

Terdapat penambahan saldo Piutang Bukan Pajak sebesar **Rp2.680.842,00** berasal dari nilai SPNP yaitu selisih nilai BAST Final dengan BAST Bank Garansi atas nomor kontrak SP-0094/PPK/DJPK/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan addendum nomor SP-0028/PPK/DJPK/2022 tanggal 27 April 2022 tentang jasa sewa mesin *fotocopy* digital Ditjen Perimbangan Keuangan TA 2022 yang belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2022.

C.1.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
Rp50.747.310,00*

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp50.747.310,00** dan **Rp50.764.456,00** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar **Rp50.747.310,00**, terdiri dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang dengan nilai yang sama **Rp50.733.906,00** yang telah diserahkan ke PUPN dan berstatus piutang macet.

DJPK telah berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta V melalui Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai ND-968/SJ.1/2022 tanggal 25 Agustus 2022 hal Konfirmasi Status dan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Negara pada unit DJPK yang telah diserahkan Pengurusannya ke PUPN. Adapun Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar **Rp13.404,00** merupakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Lainnya sebesar **Rp2.680.842,00** yang berasal dari nilai SPNP yaitu selisih nilai BAST Final dengan BAST Bank Garansi atas kontrak jasa sewa mesin fotocopy digital Ditjen Perimbangan Keuangan Tahun 2022.

C.1.1.5. Persediaan

*Persediaan
Rp1.144.469.305,00*

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar berupa Persediaan menggunakan data persediaan per tanggal 31 Desember 2022. Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp1.144.469.305,00** dan **Rp1.506.199.068,00**. Penurunan nilai persediaan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah pegawai yang bekerja dari kantor (*Work From Office/WFO*). Kenaikan jumlah pegawai tersebut mengakibatkan peningkatan penggunaan persediaan. Selain itu, sebagai penyebab penurunan nilai persediaan yaitu terdapatnya Tinta/Toner Printer yang kondisinya telah usang dan tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah.

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 per jenis persediaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

Akun	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)
117111	Barang Konsumsi	1.068.668.797	1.423.668.283	(354.999.486)
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	75.800.508	82.530.785	(6.730.277)
Total		1.144.469.305	1.506.199.068	(361.729.763)

Jumlah persediaan usang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar **Rp354.384.743,00** berupa 259 unit Tinta/Toner Printer yang kondisinya telah usang dan tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Transaksi persediaan usang pada tahun 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Barang Persediaan Usang pada DJPK KET-64/PK.1/2022 tanggal 24 Agustus 2022 senilai **Rp354.384.743,00**.

Tabel 30 Tabel Mutasi Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022

Saldo Awal 1 Januari 2022	1.506.199.068
Mutasi Tambah	850.128.819
Pembelian	850.066.119
Hasil Opname Fisik	62.700
Mutasi Kurang	1.211.858.582
Habis Pakai	857.473.839
Usang	354.384.743
Saldo per 31 Desember 2022	1.144.469.305

Tabel 31 Rincian Persediaan Usang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	-259	-354.384.743
1010304004	Tinta/Toner Printer	-259	-354.384.743
000002	Toner HP 13A	-8	-12.560.000
000003	Toner HP 49A	-9	-7.312.140
000010	Toner Samsung ML-2010D3	-7	-5.755.750
000011	Toner HP 16A	-5	-9.130.000
000012	Fuji Xerox CT201260	-14	-16.059.120
000013	Fuji Xerox CT201261	-11	-13.009.007
000014	Fuji Xerox CT201262	-22	-26.018.014
000015	Fuji Xerox CT201263	-16	-18.922.192
000016	HP CE250A	-19	-23.655.000
000017	HP CE251A	-15	-36.750.000
000018	HP CE252A	-13	-31.850.000
000019	HP CE253A	-19	-46.550.000
000020	Toner Hp 55A	-6	-12.419.994
000023	Toner Q6470A	-5	-6.637.400
000024	Toner Q7581A	-8	-13.940.960
000025	Toner Q7582A	-10	-17.426.200
000026	Toner Q7583A	-10	-17.426.200
000029	Toner HP CC530A	-5	-5.625.000
000030	Toner HP CC531A	-5	-5.550.000
000031	Toner HP CC532A	-10	-11.100.000
000032	Toner HP CC533A	-11	-12.210.000
000033	Ink Cartridge CD 971A (920XL black)	-6	-914.766
000034	Ink Cartridge CD 972A (920XL cyan)	-7	-861.000
000035	Ink Cartridge CD 973A (920XL magenta)	-7	-861.000
000036	Ink Cartridge CD 974A (920XL Yellow)	-7	-861.000
000044	HP 920 XL Black	-4	-980.000
Total		-259	-354.384.743

C.1.2 ASET TETAP

*Aset Tetap**Rp12.380.832.127,00*

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah/ dalam kegiatan operasional entitas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp12.380.832.127,00** dan **Rp17.095.888.081,00**. Rincian aset tetap menurut jenis aset tetap dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 32 Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	103.764.804.143	102.080.275.399	1.684.528.744	1,65
2	Gedung dan Bangunan	1.427.595.200	1.427.595.200	0	0,00
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	0	990.851.337	(990.851.337)	(100,00)
4	Aset Tetap Lainnya	651.888.518	634.619.773	17.268.745	2,72
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(93.304.051.953)	(87.457.087.793)	(5.846.964.160)	6,69
6	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(159.403.781)	(120.382.507)	(39.021.274)	32,41
7	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	(459.983.328)	459.983.328	(100,00)
Jumlah		12.380.832.127	17.095.888.081	(4.715.055.954)	(27,58)

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SAKTI dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33 Daftar Perbandingan Aset Tetap di Modul GLP dan Modul Aset per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Modul GLP	Modul Aset	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	103.764.804.143	103.764.804.143	0	0,00%
2	Gedung dan Bangunan	1.427.595.200	1.427.595.200	0	0,00%
3	Aset Tetap Lainnya	651.888.518	651.888.518	0	0,00%
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(93.304.051.953)	(93.304.051.953)	0	0,00%
5	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(159.403.781)	(159.403.781)	0	0,00%
Jumlah		12.380.832.127	12.380.832.127	0	0,00%

C.1.2.1. Peralatan dan Mesin*Peralatan dan
Mesin**Rp103.764.804.143,00*

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp103.764.804.143,00** dan **Rp102.080.275.399,00**. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar **Rp1.684.528.744,00** atau **1,65** persen.

Tabel 34 Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Peralatan dan Mesin	103.764.804.143	102.080.275.399	1.684.528.744	1,65
Jumlah	103.764.804.143	102.080.275.399	1.684.528.744	1,65

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar **Rp2.949.385.000,00** terdiri dari :

- pembelian Locker, A.C. Split, Televisi, Sound System, Tangga Aluminium, Dispenser, Tempat Sampah, Intercom Unit, UPS, Mixer Sound System, Teleprompter, Head Set, Handy Talky, Transmitter Receiver, Lemari Camera, Lap Top, Tablet PC, Capture Card, Splitter HDMI, dan CCTV; dan
- transfer masuk Laptop dan iPad Sekretariat Jenderal serta transfer masuk Sedan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar **Rp1.361.186.198,00** terdiri dari :

- penghentian aset dari penggunaan untuk barang berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah), Roll Opek, CCTV, Meja Kerja Besi/Metal, Meja Kerja Kayu, Kursi Besi/Metal, Kursi Kayu, Televisi, dan P.C Unit; dan
- transfer keluar barang berupa Sedan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35 Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin

Saldo Awal 1 Januari 2022	102.080.275.399
Mutasi Tambah	4.282.868.726
Pembelian	1.158.389.226
Transfer Masuk	3.124.479.500
Mutasi Kurang	2.598.339.982
Penghentian Aset Dari Penggunaan	1.971.285.482
Transfer Keluar	627.054.500
Saldo 31 Desember 2022	103.764.804.143
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	93.304.051.953
Nilai Buku per 31 Desember 2022	10.460.752.190

Rincian Daftar Peralatan dan Mesin di DJPK per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 36 Rincian Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

Kelompok Barang	Nilai
Alat Bantu	10.219.160.397
Alat Angkutan Darat Bermotor	13.141.355.426
Alat Angkutan Darat Tak	26.405.000
Alat Bengkel Tak Bermesin	20.390.730
Alat Ukur	45.000.000
Alat Kantor	12.008.396.573
Alat Rumah Tangga	18.705.989.075

Alat Studio	2.095.682.503
Alat Komunikasi	333.317.554
Peralatan Pemancar	46.860.000
Peralatan Komunikasi Navigasi	7.700.000
Alat Kedokteran	5.934.500
Unit Alat Laboratorium	20.470.000
Alat Khusus Kepolisian	13.624.000
Komputer Unit	16.014.812.057
Peralatan Komputer	30.622.570.528
Alat Kerja Penerbangan	59.600.000
Unit Peralatan Proses/Produksi	377.535.800
Peralatan dan Mesin	103.764.804.143

C.1.2.2. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp1.427.595.200,00*

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp1.427.595.200,00** dan **Rp1.427.595.200,00** yang merupakan aset tetap berupa 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen. Rumah Negara atau rumah dinas tersebut berlokasi di Jalan Cipete V No. 8a, RT.1/RW.4, Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410.

C.1.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0,00*

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp990.851.337,00** yang merupakan aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan. Nilai pos Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari nilai akun Jaringan per 31 Desember 2021 dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan sehingga nilainya sama dengan neraca per 31 Desember 2021.

Telah dilakukan Identifikasi tinjauan atas aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) di DJPK bersama dengan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil tinjauan tersebut disepakati bahwa seluruh aset JIJ di DJPK dilakukan transfer aset (transfer keluar) kepada Sekretariat Jenderal.

Rincian Daftar Jalan, Irigasi, dan Jaringan di DJPK per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 37 Rincian Daftar Jalan, Irigasi, dan Jaringan di DJPK per 31 Desember 2022

Kelompok Barang	Nilai
Instalasi Air Bersih / Air Baku	0
Instalasi Air Kotor	0
Instalasi Gardu Listrik	0
Jaringan	0

C.1.2.4. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp651.888.518,00*

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp651.888.518,00** dan **Rp634.619.773,00**. Nilai pos Aset tetap Lainnya berasal dari nilai akun per 31 Desember 2021. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar **Rp17.268.745,00** atau **2,72** persen.

Tabel 38 Rincian Daftar Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

Kelompok Barang	Nilai
Aset Tetap Lainnya	651.888.518
Bahan Perpustakaan Tercetak	648.458.518
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	3.430.000
Aset Tetap Lainnya	651.888.518

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp17.268.745,00** berasal dari pembelian buku koleksi perpustakaan tercetak.

C.1.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(93.463.455.734,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing **Rp(93.463.455.734,00)** dan **Rp(88.037.453.628,00)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	103.764.804.143	93.304.051.953	10.460.752.190
2	Gedung dan Bangunan	1.427.595.200	159.403.781	1.268.191.419
Jumlah		105.192.399.343	93.463.455.734	11.728.943.609

C.1.3 ASET LAINNYA

*Aset Lainnya
Rp2.524.832.538,00*

Jumlah Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp2.524.832.538,00** dan **Rp3.286.658.520,00**. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar **Rp761.825.982,00** atau **23,18** persen karena meningkatnya akumulasi penyusutan pada aset tidak berwujud dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Tabel 40 Perbandingan Posisi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
Aset Lainnya	2.524.832.538	3.286.658.520	(761.825.982)	(23,18)
Jumlah	2.524.832.538	3.286.658.520	(761.825.982)	(23,18)

C.1.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp9.891.147.694,00

Jumlah Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.891.147.694,00 dan Rp8.725.900.966,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp1.165.246.728,00 atau 13,35 persen.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud (ATB) pada DJPK berupa *software* dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tabel 41 Perbandingan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Software	9.060.922.478	8.183.522.478	877.400.000	10,72
Lisensi	830.225.216	542.378.488	287.846.728	53,07
Jumlah	9.891.147.694	8.725.900.966	1.165.246.728	13,35

Mutasi tambah sebesar Rp1.165.246.728,00 terdiri atas pembelian Software senilai Rp257.200.000, pembelian Lisensi senilai Rp287.846.728,00, penyelesaian pembangunan dengan KDP untuk Software sebesar Rp189.200.000,00 pengembangan nilai aset (langsung) Software senilai Rp175.750.000,00 dan pengembangan melalui KDP untuk Software senilai Rp225.250.000,00. Termasuk di dalamnya pengembangan Aplikasi Portal Pelaporan DJPK Modul DAK Nonfisik (Aplikasi Aladin) senilai Rp49.200.000,00 yang dibiayai dengan sumber dana dari Hibah Luar Negeri PFM-MDTF III pada DIPA DJPK TA 2022.

Rincian Daftar Aset Tak Berwujud di DJPK per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 42 Rincian Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022

No	Uraian ATB	NUP	Tahun Perolehan	Merk/Identitas Barang	Nilai
1	Software Komputer	16	2011	Aplikasi WBRS	1.297.180.885
2	Software Komputer	18	2013	Document Management System	190.780.000
3	Software Komputer	19	2015	Asset Management DJPK	155.000.000
4	Lisensi	3	2014	Microsoft Sharepoint 2013	84.168.700
5	Lisensi	4	2014	Jrebel	5.800.000
6	Lisensi	5	2014	Jrebel	5.800.000
7	Lisensi	6	2014	ZK Charts	8.220.600
8	Lisensi	7	2014	ZK Charts	8.220.600
9	Lisensi	8	2014	ZK Pivot Table	13.750.000
10	Lisensi	9	2014	ZK Pivot Table	13.750.000
11	Software Komputer	20	2017	imp	38.187.600
12	Software Komputer	19	2017	SQLCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL	37.840.000

LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2022 AUDITED

No	Uraian ATB	NUP	Tahun Perolehan	Merk/Identitas Barang	Nilai
13	Software Komputer	22	2018	Template Website DJPK	81.000.000
14	Software Komputer	23	2018	Modul Kualitas Data Administrasi Database	80.000.000
15	Software Komputer	24	2018	Aplikasi Call Center	377.202.353
16	Software Komputer	25	2018	Modul Layanan Alert System SIKD Executive	142.000.000
17	Software Komputer	26	2018	Modul Pengembangan LKPD Secara Elektronik	194.000.000
18	Software Komputer	27	2018	Modul Pengembangan Sinergi	95.000.000
19	Software Komputer	28	2018	Pengembangan SIKD Core	80.000.000
20	Software Komputer	29	2018	Sistem Pengembangan Pegawai	103.800.000
21	Software Komputer	30	2018	Monitoring Trend Keuangan	142.000.000
22	Software Komputer	31	2018	Modul Keamanan Jaringan	49.500.000
23	Software Komputer	32	2018	Aplikasi Perencanaan Anggaran	139.000.000
24	Software Komputer	33	2018	Modul Penyiapan Data Konsolidasi	106.500.000
25	Software Komputer	34	2018	Modul Interkoneksi Perbankan	21.000.000
26	Software Komputer	35	2019	Stata Lisence	163.166.300
27	Software Komputer	36	2019	Dashboard SIKD	24.000.000
28	Software Komputer	37	2019	Jasa Konsul SIMPEG	138.000.000
29	Software Komputer	38	2019	Pembangunan Aplikasi Layanan Perlengkapan Dan Rumah Tangga DJPK	40.000.000
30	Software Komputer	39	2019	Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Ruang Rapat DJPK	23.000.000
31	Software Komputer	40	2019	Paket Pekerjaan Pengadaan Platform Integrasi Dan Sinkronisasi Data Keuangan Daerah	1.342.000.000
32	Software Komputer	43	2019	Aplikasi DAK Non Fisik	169.500.000
33	Software Komputer	44	2019	Pengembangan QR Code	45.000.000
34	Software Komputer	45	2019	Core SIKD	307.000.000
35	Software Komputer	46	2019	Sinergi Back End	131.980.000
36	Software Komputer	47	2019	JFAKPD (Backend,Frontend,analisis,data base)	509.000.000
37	Software Komputer	48	2019	Website	36.000.000
38	Software Komputer	49	2019	E Jurnal DJPK	42.000.000
39	Software Komputer	50	2020	Panic Buton (Logbook)	45.000.000
40	Software Komputer	51	2020	Aplikasi E-Government Modul E-Monev dan E-Reporting Front End, Modul E-Monev dan E-Reporting Back End	95.500.000
41	Software Komputer	52	2020	Aplikasi SiPerda	47.000.000
42	Software Komputer	53	2020	Aplikasi Penerimaan Laporan Penyaluran DAU (DAU Reguler dan DAU Tambahan) – Back End	96.000.000

LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2022 AUDITED

No	Uraian ATB	NUP	Tahun Perolehan	Merk/Identitas Barang	Nilai
43	Software Komputer	54	2020	Aplikasi Pajak Rokok (Pelaporan) – Back End	96.000.000
44	Software Komputer	55	2020	Aplikasi Pinjaman dan Obligasi Daerah – Modul Izin Pelampauan Defisit dan Verifikasi Izin Pelampauan Defisit	254.750.000
45	Software Komputer	56	2020	Pengadaan Jasa Konsultansi Pembangunan Sistem Rekon Elektronik Transfer (SiRetra)	48.500.000
46	Lisensi	10	2020	Vmix Pro Software Video Mixer Lisensi Original	23.000.000
47	Lisensi	11	2020	Pengadaan license subscription software Tableau	83.050.000
48	Lisensi	12	2020	License subscription	35.854.500
49	Lisensi	13	2020	license EViews 12 Single User License – Enterprise Edition	32.082.400
50	Lisensi	14	2020	Adobe Creative Cloud for teams All Apps Multiple Platforms (2 unit) – 1 Year Subscription	89.650.000
51	Lisensi	15	2021	Lisensi Aplikasi Tableau	38.973.000
52	Lisensi	16	2021	Lisensi Aplikasi Adobe	12.870.000
53	Software Komputer	57	2021	Aplikasi DID	48.500.000
54	Software Komputer	58	2021	Aplikasi DWH	269.000.000
55	Software Komputer	59	2021	Aplikasi Terpadu Kesekretariatan (ATK)	98.000.000
56	Software Komputer	60	2021	Aplikasi Verdana	84.000.000
57	Software Komputer	61	2021	Aplikasi ALPHARD	97.000.000
58	Software Komputer	62	2021	Aplikasi Ticketing	94.000.000
59	Lisensi	17	2021	Aplikasi ZOHO	6.000.979
60	Lisensi	18	2022	Aplikasi Adobe Creative Cloud for teams all aps	83.332.002
61	Lisensi	19	2022	Lisensi Tableau	48.673.500
62	Software Komputer	63	2022	Aplikasi Aladin	49.200.000
63	Software Komputer	64	2022	Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik	47.200.000
64	Software Komputer	65	2022	Aplikasi E-Government DJPK Modul E-Planning	95.000.000
65	Software Komputer	67	2022	Aplikasi Penilaian Kinerja Desa Modul Input Data Kinerja Desa	47.000.000
66	Lisensi	20	2022	Lisensi Software Adobe Creative Cloud For Teams All Apps	42.051.772
67	Lisensi	21	2022	Lisensi Tableau Lisensi Tableau	41.247.600
68	Lisensi	22	2022	Lisensi Navicat	16.775.454
69	Lisensi	23	2022	Lisensi Tableau Lisensi Tableau	13.941.600
70	Lisensi	24	2022	Lisensi Tableau Lisensi Tableau	13.941.600
71	Lisensi	25	2022	Lisensi Tableau Lisensi Tableau	13.941.600
72	Lisensi	26	2022	Lisensi Tableau Lisensi Tableau	13.941.600
73	Software Komputer	68	2022	Pengembangan Aplikasi Presensi Modul Data Referensi dan Laporan	28.000.000

No	Uraian ATB	NUP	Tahun Perolehan	Merk/Identitas Barang	Nilai
74	Software Komputer	69	2022	Pengembangan Aplikasi Presensi Modul Perhitungan dan Monitoring Kehadiran	28.000.000
75	Software Komputer	70	2022	aplikasi penilaian kinerja desa modul webservice	28.000.000
76	Software Komputer	71	2022	Aplikasi penilaian kinerja desa modul verifikasi, monitoring dan laporan apbdes	28.000.000
77	Software Komputer	72	2022	Aplikasi Diagnostic Tools PDRD Modul Admin DJPK	48.000.000
78	Software Komputer	73	2022	Aplikasi Diagnostic Tools PDRD Modul Admin Pemda	48.000.000
Total					9.891.147.694

C.1.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain

Rp448.631.261,00

Jumlah Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp448.631.261,00 dan Rp423.389.326,00 terjadi kenaikan sebesar Rp25.241.935,00 atau 5,96 persen yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional DJPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Aset lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Tabel 43 Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	448.631.261	423.389.326	25.241.935	5,96
Total	448.631.261	423.389.326	25.241.935	5,96

Mutasi tambah sebesar Rp1.971.285.482,00 berasal dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya. Mutasi kurang sebesar Rp1.946.043.547,00 yang berasal dari penghapusan BMN.

Tabel 44 Mutasi / Perubahan Aset Lain-lain

Saldo Awal 1 Januari 2022	423.389.326
Mutasi Tambah	1.971.285.482
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.971.285.482
Mutasi Kurang	1.946.043.547
Pencatatan Barang yang Mau dihapuskan	1.901.515.547
Penghapusan	44.528.000
Saldo 31 Desember 2022	448.631.261
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	374.631.261
Nilai Buku per 31 Desember 2022	74.000.000

Rincian Daftar Aset Lain-Lain di DJPK per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 45 Rincian Daftar Aset Lain-lain per 31 Desember 2022

Kelompok Barang	Nilai
Alat Kantor	78.290.000
Alat Rumah Tangga	147.413.150
Komputer Unit	69.769.935
Peralatan Komputer	79.158.176
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	74.000.000
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	448.631.261

C.1.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp7.814.946.417,00*

Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp7.814.946.417,00 dan Rp5.862.631.772,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.952.314.645,00 atau 33,30 persen. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 46 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	448.631.261	374.631.261	74.000.000
2	Software	9.060.922.478	7.212.650.623	1.848.271.855
3	Lisensi	830.225.216	227.664.533	602.560.683
Jumlah		10.339.778.955	7.814.946.417	2.524.832.538

C.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.2.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp5.830.832,00*

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.830.832,00 dan Rp230.358.918,00.

Tabel 47 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2022 dan 2021

2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)
5.830.832	230.358.918	(224.528.086)

Nilai utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2022 terdiri dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) sebesar Rp649.000,00 berupa kekurangan uang makan bulan Desember 2022 yang baru dibayarkan pada 2023 dan Belanja Barang Yang Masih

Harus Dibayar (212112) sebesar **Rp5.181.832,00** berupa tagihan PLN dan Telkom pemakaian periode Desember 2022 yang tagihannya baru ditagihkan pada Januari 2023.

C.3 EKUITAS

Ekuitas

Rp16.046.970.576,00

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp16.046.970.576,00** bila dibandingkan dengan jumlah per 31 Desember 2021 yaitu **Rp21.664.446.143,00**, turun sebesar **Rp5.617.475.567,00** atau **25,93** persen. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK

Pendapatan PNB

Rp16.045.920,00

Jumlah Pendapatan PNB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar **Rp16.045.920,00** dan **Rp38.000.000,00**. Rincian PNB disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 48 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	16.045.920	38.000.000	(21.954.080)	(57,77)
Jumlah	16.045.920	38.000.000	(21.954.080)	(57,77)

D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai

Rp13.445.841.459,00

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp13.445.841.459,00** dan **Rp37.099.532.857,00**. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp23.653.691.398,00** atau **63,76** persen. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 49 Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	7.266.990.520	25.302.367.660	(18.035.377.140)	(71,28)
Beban Pembulatan Gaji PNS	103.047	207.139	(104.092)	(50,25)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	498.361.980	1.747.741.030	(1.249.379.050)	(71,49)
Beban Tunj. Anak PNS	154.596.766	531.584.600	(376.987.834)	(70,92)
Beban Tunj. Struktural PNS	421.440.000	1.435.450.000	(1.014.010.000)	(70,64)
Beban Tunj. Fungsional PNS	281.690.000	1.016.260.000	(734.570.000)	(72,28)
Beban Tunj. PPh PNS	10.673.646	84.253.157	(73.579.511)	(87,33)
Beban Tunj. Beras PNS	407.072.820	1.423.777.200	(1.016.704.380)	(71,41)
Beban Uang Makan PNS	3.993.079.000	4.421.015.000	(427.936.000)	(9,68)
Beban Tunj. Umum PNS	236.518.680	824.791.071	(588.272.391)	(71,32)
Beban Uang Lembur	175.315.000	312.086.000	(136.771.000)	(43,82)
Jumlah	13.445.841.459	37.099.532.857	(23.653.691.398)	(63,76)

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp690.101.447,00

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar *Rp690.101.447,00* dan *Rp688.709.277,00*. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar *Rp1.392.170,00* atau *0,20* persen. Kenaikan disebabkan oleh peningkatan jumlah pegawai yang bekerja dari kantor (*Work From Office/WFO*). peningkatan jumlah pegawai tersebut mengakibatkan peningkatan penggunaan persediaan sehingga beban persediaan menjadi lebih besar.

Tabel 50 Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Persediaan	690.101.447	688.709.277	1.392.170	0,20
Jumlah	690.101.447	688.709.277	1.392.170	0,20

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan
Jasa
Rp13.484.036.292,00

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar *Rp19.052.980.883,00* dan *Rp82.680.207.337,00*. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar *Rp63.627.226.454,00* atau *76,96* persen. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel 51 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Keperluan Perkantoran	5.337.372.088	4.953.159.510	384.212.578	7,76
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		325.164.146	(325.164.146)	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas dan Pos Pusat	229.405.375	273.237.100	(43.831.725)	(16,04)
Beban Honor Operasional Satker	546.730.000	549.934.000	(3.204.000)	(0,58)
Beban Barang Operasional Lainnya	129.975.450	73.200.006	56.775.444	
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	1.192.251.227	2.857.255.443	(1.665.004.216)	(58,27)
Beban Bahan	2.027.933.572	974.496.830	1.053.436.742	108,10
Beban Honor Output Kegiatan	664.730.000	523.490.000	141.240.000	26,98
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin		2.724.900	(2.724.900)	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	311.441.582	310.202.825	1.238.757	0,40
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang		35.000.000	(35.000.000)	(100,00)
Beban Langganan Listrik	5.665.982		5.665.982	
Beban Langganan Telepon	184.979.497	249.037.002	(64.057.505)	(25,72)
Beban Daya dan Jasa Lainnya	16.604.260		16.604.260	
Beban Jasa Konsultan	3.307.984.297	66.859.282.352	(63.551.298.055)	(95,05)
Beban Sewa	1.432.858.626	1.734.361.833	(301.503.207)	(17,38)
Beban Jasa Profesi	2.252.610.000	1.735.005.400	517.604.600	29,83
Beban Jasa Lainnya	1.328.832.778	764.872.730	563.960.048	73,73
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	83.606.149	459.783.260	(376.177.111)	(81,82)
Jumlah	19.052.980.883	82.680.207.337	(63.627.226.454)	(76,96)

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

*Beban
Pemeliharaan
Rp5.761.926.005,00*

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal (termasuk beban persediaan bahan untuk pemeliharaan).

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp5.761.926.005,00** dan **Rp4.909.167.587,00**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp852.758.418,00** atau **17,37** persen. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Tabel 52 Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.449.237.972	424.801.362	1.024.436.610	241,16
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	92.996.880	19.999.800	72.997.080	364,99
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.052.381.461	4.308.443.210	(256.061.749)	(5,94)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	167.309.692	123.750.715	43.558.977	35,20
Beban Pemeliharaan Jaringan		15.040.000	(15.040.000)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Lainnya		17.132.500	(17.132.500)	(100,00)
Jumlah	5.761.926.005	4.909.167.587	852.758.418	17,37

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas
Rp14.340.970.181,00

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.340.970.181,00 dan Rp7.059.390.137,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.281.580.044,00 atau 103,15 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut.

Tabel 53 Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.216.057.903	3.280.799.554	1.935.258.349	58,99
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.078.000	1.836.000	113.242.000	6167,86
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.514.291.708	2.964.002.551	3.550.289.157	119,78
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.495.542.570	812.752.032	1.682.790.538	207,05
Jumlah	14.340.970.181	7.059.390.137	7.281.580.044	103,15

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp9.490.703.852,00

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tidak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.490.703.852,00 dan Rp10.211.756.568,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp721.052.716,00 atau 7,06 persen. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 54 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.509.965.979	8.387.344.461	(877.378.482)	(10,46)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.021.274	39.021.274	-	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	14.643.889	29.287.778	(14.643.889)	(50,00)
Jumlah Penyusutan	7.563.631.142	8.455.653.513	(892.022.371)	(10,55)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.927.072.710	1.756.103.055	170.969.655	9,74
Jumlah Amortisasi	1.927.072.710	1.756.103.055	170.969.655	9,74
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.490.703.852	10.211.756.568	(721.052.716)	(7,06)

D.8 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

*Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih
Rp(17.146,00)*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp(17.146,00)** dan **Rp20.242,00**. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 55 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(17.146)	20.242	(37.388)	(184,71)
Jumlah	(17.146)	20.242	(37.388)	(184,71)

D.9 KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp188.897.951,00*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 56 Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021
Kegiatan Non Operasional		
Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	149.446.792	91.037.870
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	1.376.062
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	149.446.792	89.661.808
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	16.040.000	27.493.000
Beban Dari kegiatan Non Operasional Lainnya	354.384.743	20.689.344
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	(338.344.743)	6.803.656
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(188.897.951)	96.465.464

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp165.486.792,00** berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar **Rp149.446.792,00**, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar **Rp15.750.000,00** serta Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar **Rp290.000,00**.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp354.384.743,00** seluruhnya berasal dari Beban Persediaan Usang/Rusak.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp21.664.466.143,00

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp21.664.466.143,00** dan **Rp28.580.252.891,00**. Nilai ekuitas awal berasal dari nilai ekuitas akhir pada 31 Desember 2021.

Tabel 57 Perbandingan Nilai Ekuitas Awal

2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)
21.664.466.143	28.580.252.891	(6.915.786.748)

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO Rp
Rp(62.955.358.712,00)

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar **Rp(62.955.358.712,00)** dan **Rp(142.514.318.541,00)**.

Tabel 58 Perbandingan Surplus/Defisit LO

2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)
(62.955.358.712)	(142.514.318.541)	79.558.959.829

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Tidak ada Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(105.522.224,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.546.645,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi antar
Entitas
Rp57.337.863.145,00

Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp57.337.863.145,00 dan Rp135.705.600.662,00.

Tabel 59 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(187.642.654)
Ditagihkan ke Entitas Lain	53.620.999.048
Transfer Keluar	(1.744.948.515)
Transfer Masuk	2.457.878.981
Pengesahan Hibah Langsung	3.191.576.285
Jumlah	57.337.863.145

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Kementerian/Lembaga yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp187.642.654,00 dan DKEL sebesar Rp53.620.999.048,00.

E.4.2 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer Keluar/Transfer Masuk (TK/TM) merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk berasal dari :

- pengalihan penggunaan BMN Sekretariat Jenderal hasil dari pengadaan Barang Milik Negara terkonsolidasi untuk Laptop dan Telephone Mobile sebesar Rp2.497.925.000,00; dan
- transfer masuk berupa Sedan berasal dari pengalihan penggunaan BMN Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko senilai Rp626.554.500,00.

Di sisi lain DJPK melakukan Transfer Keluar berupa :

- sedan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan senilai Rp627.054.500,00;
- aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) kepada Sekretariat Jenderal sebesar Rp990.851.337,00; dan
- Aset Tetap Renovasi (ATR) sebagai hasil dari renovasi Gedung yang dilakukan sebesar Rp959.986.751,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Nilai pengesahan hibah langsung per 31 Desember 2022 sebesar [Rp3.191.576.285,00](#). Nilai tersebut berasal dari pengesahan Hibah Langsung berupa Jasa, yaitu Hibah dari Pemerintah Australia melalui penyelenggaraan Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dengan nomor register 2VBMKB3A sesuai BAST-I/PK.1/I/2022 sebesar [Rp2.853.250.695,00](#) dan sesuai BAST-II/PK.1/II/2022 sebesar [Rp338.325.590,00](#).

E.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah [Rp18.966.294.650,00](#) masing-masing sebesar [Rp16.046.970.576,00](#) dan [Rp21.664.466.143,00](#).

Tabel 60 Perbandingan Nilai Ekuitas Akhir

2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)
16.046.970.576	21.664.466.143	(5.617.495.567)

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Utilisasi Penggunaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berupa Rumah Dinas Jabatan Eselon I untuk digunakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan nomor BA-30/PR.1/2022 tanggal 14 Desember 2022, dan Perjanjian Utilisasi Penggunaan nomor PRJ-25/PR.1/2022 dan PRJ-1/PK.1/2022 tanggal 14 Desember 2022, maka seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang masih melekat pada BMN berupa Rumah Dinas Golongan I Tipe A Permanen yang berlokasi di Jalan Sanjaya Buntu No.4 RT.005/RW.004 Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan nilai perolehan Rp1.771.513.114,00 telah beralih ke DJPK dalam jangka waktu 2 (dua) tahun semenjak penandatanganan BAST.

Sehubungan dengan pelaksanaan sentralisasi gaji, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-93/SJ.1/2023 tanggal 23 Januari 2023 hal Kebijakan Pencatatan BA 015 TA 2022 Dampak Sentralisasi Gaji, pendapatan sewa rumah dinas Dirjen Perimbangan Keuangan Tahun 2022 yang dipungut melalui potongan SPM Gaji KP Sekretariat Jenderal, realisasi pendapatan sewa yang timbul dicatat sebagai pendapatan LRA dan LO pada Satker KP Setjen.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

PENDUKUNG

CETAKAN LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 06
SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 440941

Waktu Olap : 2023-01-24 07:45:29.0 [B@06eb31]
Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 24/01/23 8:29 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	187,642,654	187,642,654	0	0	158,592,512	158,592,512	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	187,642,654	187,642,654	0	0	158,592,512	158,592,512	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	13,931,013,000	13,671,787,310	(259,225,690)	98	37,495,827,000	36,981,249,712	514,577,288	99
	BELANJA BARANG	37,583,647,000	36,648,320,288	(935,326,712)	98	30,554,813,000	28,731,774,765	1,823,038,235	94
	BELANJA MODAL	3,363,816,000	3,300,891,450	(62,924,550)	98	4,508,385,000	4,425,292,606	83,092,394	98
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 06
SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 440941

Waktu Olap : 2023-01-24 07:45:29.0 [B@2af3195]
Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 24/01/23 8:29 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	54,878,476,000	53,620,999,048	(1,257,476,952)	98	72,559,025,000	70,138,317,083	2,420,707,917	98
C	PEMBAYARAN				0				0

NERACA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
KDUAPPAW : 015060199KP INSTANSI PUSAT
KODE SATKER : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl Data 24/01/23 7:47 AM
Tgl. Cetak 24/01/2023 8:29 AM
lap_neraca_satker_komparatif--rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	53,414,748	56,843,848	(3,429,100)	(6.03)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(50,747,310)	(50,764,456)	17,146	(0.03)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2,667,438	6,079,392	(3,411,954)	(56.12)
Persediaan	1,144,469,305	1,506,199,068	(361,729,763)	(24.02)
JUMLAH ASET LANCAR	1,147,136,743	1,512,278,460	(365,141,717)	(24.15)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	103,764,804,143	102,080,275,399	1,684,528,744	1.65
Gedung dan Bangunan	1,427,595,200	1,427,595,200	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	990,851,337	(990,851,337)	(100.00)
Aset Tetap Lainnya	651,888,518	634,619,773	17,268,745	2.72
AKUMULASI PENYUSUTAN	(93,463,455,734)	(88,037,453,628)	(5,426,002,106)	6.16
JUMLAH ASET TETAP	12,380,832,127	17,095,888,081	(4,715,055,954)	(27.58)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	9,891,147,694	8,725,900,966	1,165,246,728	13.35
Aset Lain-lain	448,631,261	423,389,326	25,241,935	5.96
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(7,814,946,417)	(5,862,631,772)	(1,952,314,645)	33.30
JUMLAH ASET LAINNYA	2,524,832,538	3,286,658,520	(761,825,982)	(23.18)
JUMLAH ASET	16,052,801,408	21,894,825,061	(5,842,023,653)	(26.68)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,830,832	230,358,918	(224,528,086)	(97.47)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,830,832	230,358,918	(224,528,086)	(97.47)
JUMLAH KEWAJIBAN	5,830,832	230,358,918	(224,528,086)	(97.47)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	16,046,970,576	21,664,466,143	(5,617,495,567)	(25.93)
JUMLAH EKUITAS	16,046,970,576	21,664,466,143	(5,617,495,567)	(25.93)
JUMLAH EKUITAS	16,046,970,576	21,664,466,143	(5,617,495,567)	(25.93)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16,052,801,408	21,894,825,061	(5,842,023,653)	(26.68)

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 06
WILAYAH/PROVINSI : 015060199KP
SATUAN KERJA : 440941
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
INSTANSI PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 24/01/23 8:28 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker--SAKTI
Tgl Data : 24/01/23 7:48 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	16,045,920	38,000,000	(21,954,080)	(57.774)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	16,045,920	38,000,000	(21,954,080)	(57.774)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	16,045,920	38,000,000	(21,954,080)	(57.774)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	13,445,841,459	37,099,532,857	(23,653,691,398)	(63.757)
Beban Persediaan	690,101,447	688,709,277	1,392,170	0.202
Beban Barang dan Jasa	19,052,980,883	82,680,207,337	(63,627,226,454)	(76.956)
Beban Pemeliharaan	5,761,926,005	4,909,167,587	852,758,418	17.371
Beban Perjalanan Dinas	14,340,970,181	7,059,390,137	7,281,580,044	103.147
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 06
WILAYAH/PROVINSI : 015060199KP
SATUAN KERJA : 440941
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
INSTANSI PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 24/01/23 8:28 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 24/01/23 7:48 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9,490,703,852	10,211,756,568	(721,052,716)	(7.061)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(17,146)	20,242	(37,388)	(184.705)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	62,782,506,681	142,648,784,005	(79,866,277,324)	(55.988)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(62,766,460,761)	(142,610,784,005)	79,844,323,244	(55.988)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	149,446,792	89,661,808	59,784,984	66.678
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	149,446,792	91,037,870	58,408,922	64.159
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	1,376,062	(1,376,062)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(338,344,743)	6,803,656	(345,148,399)	(5,072.984)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	16,040,000	27,493,000	(11,453,000)	(41.658)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	354,384,743	20,689,344	333,695,399	1,612.885
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(188,897,951)	96,465,464	(285,363,415)	(295.819)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(62,955,358,712)	(142,514,318,541)	79,558,959,829	(55.825)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(62,955,358,712)	(142,514,318,541)	79,558,959,829	(55.825)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KP
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl Data : 24/01/23 7:49 AM
Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 24/01/23 8:28 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	21,664,466,143	28,580,252,891	(6,915,786,748)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(62,955,358,712)	(142,514,318,541)	79,558,959,829	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(107,068,869)	107,068,869	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(105,522,224)	105,522,224	-
LAIN-LAIN	0	(1,546,645)	1,546,645	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	57,337,863,145	135,705,600,662	(78,367,737,517)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,617,495,567)	(6,915,786,748)	1,298,291,181	-
EKUITAS AKHIR	16,046,970,576	21,664,466,143	(5,617,495,567)	-

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022

		LK HLN 1	LK HLN 2	Jumlah
1.	Nama Hibah Luar Negeri	Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF) Phase III	Welfare Through Community Collaboration On Services/Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)	
2.	Pemberi Hibah	World Bank	Pemerintah Australia	
3.	Nama Proyek	Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF) Phase III	Welfare Through Community Collaboration On Services/Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)	
4.	Grant ID	TF0B5420	SA 14.12.2015	
5.	No. Register	2FPJR4SA	2VBMKB3A	
6.	Date Sign	18 Mei 2021	14 Desember 2015	
7.	Date Effective	18 Mei 2021	1 Januari 2016	
8.	Closing Date	30 Juni 2025	30 Juni 2022	
9.	Grant Amount	USD547,242	AUD200,000,000.00	
10.	Disbursement s.d 2021	Rp1.228.713.000,00	Rp6.200.130.114,00	
11.	Disbursement pada tahun 2022	Rp4.262.818.000,00	Rp6.200.130.114,00	
12.	Belanja Tahun 2022 (Rupiah)	Rp3.952.324.251,00		Rp3.952.324.251,00
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang	Rp3.903.124.251,00		Rp3.903.124.251,00
	c. Belanja Modal	Rp49.200.000,00		Rp49.200.000,00
	d. Belanja Bansos			
13.	Neraca (Rupiah)			Rp3.240.776.285,00
	a. Aset Lancar			
	b. Aset Tetap			
	c. Aset Lainnya	Rp49.200.000,00		Rp49.200.000,00
	d. Kewajiban			
	e. Ekuitas		Rp3.191.576.285,00	Rp3.191.576.285,00
14.	Executing Agency	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	Kementerian PPN/Bappenas	
15.	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK	BPK	

SURAT HASIL REKONSILIASI DENGAN KPPN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA II

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 440941
SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	54,878,476,000	54,878,476,000	0
2	Belanja	53,804,984,437	53,804,984,437	0
3	Pengembalian Belanja	-183,985,389	-183,985,389	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	187,642,654	187,642,654	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	3,191,576,285	3,191,576,285	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21-JAN-23





**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KEUANGAN TA 2022 *AUDITED*

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Gedung Radius Prawiro Lt.10
Kompleks Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin No.1
Sawah Besar, Jakarta Pusat
www.djpk.kemenkeu.go.id
dering DJPK 150-420